



## STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGATASI MASALAH EKONOMI PADA MASA REFORMASI (1999 – 2004)

Layna Kamilah Fachrunnisa<sup>1</sup>, Laely Armiyati<sup>2\*</sup>, Iyus Jayusman<sup>3</sup>  
Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi <sup>1,2,3</sup>  
Email: [laely.armiyati@unsil.ac.id](mailto:laely.armiyati@unsil.ac.id)

### *Abstract*

*The 1997 economic crisis was a miserable history for the Indonesian. The New Order government, which was unable to handle the storm of crises, made people's lives even more miserable. The economic reforms carried out by the post-New Order government were expected to overcome the crisis. This study aims to explore the various strategies adopted by the government at the beginning of the reform to deal with the crisis. The government in question is from 1999 to 2004. The research method uses the historical method with 4 steps, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The years 2001 and 2002 recorded the highest inflation rates, the weakening of the rupiah exchange rate against the US dollar, and the highest annual interest rates. The strategy undertaken to deal with the economic crisis included carrying out Monetary Policy (controlling the money supply and raising SBI interest rates), bank liquidation, forming the National Economic Council, financial restructuring, and increasing investment. These various strategies have had a positive impact on reducing the rate of inflation and increasing the rate of economic growth.*

**Keywords** : *Reformation Era, Economy Crisis, Government Policy*

### Abstrak

Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi salah satu periode kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang tidak mampu menangani badai krisis, menyebabkan kehidupan rakyat semakin sengsara. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan pasca Orde Baru diharapkan dapat mengatasi krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintahan pada awal reformasi untuk menangani krisis. Pemerintahan yang dimaksud adalah dalam rentang waktu 1999 hingga 2004. Metode penelitian menggunakan metode sejarah dengan 4 langkah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahun 2001 dan 2002 tercatat memiliki angka inflasi paling tinggi, semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dan suku bunga tahunan tertinggi. Strategi yang dilakukan untuk menangani krisis ekonomi meliputi melakukan Kebijakan Moneter (mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga SBI), likuidasi perbankan, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional, restrukturisasi keuangan, dan peningkatan investasi. Berbagai strategi ini



memberikan dampak positif untuk menurunkan laju inflasi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Masa Reformasi, Krisis Ekonomi, Kebijakan Pemerintah

## PENDAHULUAN

Perekonomian menjadi unsur penting dalam proses pembangunan negara (Huda, 2021). Namun demikian, perekonomian sebuah negara tidak akan selalu berada pada posisi stabil. Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia tercatat telah mengalami empat kali krisis ekonomi yang dampaknya besar yaitu tahun 1930-an, 1940-an, 1960-an, dan 1990-an (Armiyati, 2014). Krisis paling fenomenal adalah yang terjadi pada tahun 1990-an, tepatnya tahun 1997 dimana seluruh aspek kehidupan masyarakat benar-benar terpuruk saat itu. Bahkan, Indonesia hampir dinyatakan bangkrut karena tidak mampu menahan tingginya laju inflasi hingga angka pertumbuhan ekonomi berada pada minus 13,68%. Krisis ini juga menjadi pemicu pergolakan politik yang membuat lengsernya rezim Orde Baru. Bahkan mengakibatkan kegaduhan luar biasa di seluruh kalangan baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat awam.

Penelitian yang membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia pada awal Reformasi telah dilakukan oleh Maria Winda Klaudia dan Ida Bagus Nyoman Wartha yang berjudul *Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia pada Masa Awal Reformasi tahun 1998-1999*. Penelitian ini membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 1998-1999. Kondisi ekonomi yang dibahas masih global. Selain itu, terdapat tulisan lainnya dari Kwik Kian Gie yang berjudul *"Ekonomi Indonesia dalam krisis dan transisi politik"* membahas tentang kejadian-kejadian ekonomi di masa lalu yang



menganalisis dari kebijakan yang diambil pada saat itu, sejak terjadinya krisis ekonomi yang berkelanjutan menjadi resesi, depresi dan stagflasi banyak sekali yang memberikan kritik kepada pemerintah bahwasannya pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dan tidak cukup bekerja keras untuk mengangkat bangsa Indonesia dari jurang stagflasi. Sedangkan kajian tentang ekonomi pada periode tahun 2003-2004 juga sudah dilakukan oleh Faisal Baasir dalam tulisannya berjudul *"Indonesia Pasca Krisis catatan politik dan ekonomi 2003-2004"* yang mengkaji tentang berbagai kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi yang diambil dalam kurun waktu 2003-2004.

Kajian lainnya yang membahas tentang kondisi ekonomi adalah karya Prof. Dr. Boediono yang berjudul *"Ekonomi Indonesia: dalam Lintasan Sejarah"* yang diterbitkan oleh Mizan Media Utama tahun 2016. Buku ini membahas tentang sejarah ekonomi sejak jaman pra VOC hingga pembahasan pilihan ekonomi politik di masa krisis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada dasarnya sasaran ekonomi tunduk terhadap sasaran politik, namun pada masa masa tertentu seperti krisis ekonomi, sasaran ekonomi menjadi bagian penting dalam mensubordinasi sasaran politik.

Periode tahun 1999 hingga 2004 menjadi tahun-tahun perjuangan untuk kembali menormalkan kondisi ekonomi Indonesia. Empat kali pergantian presiden terjadi dalam kurun waktu lima tahun, tentu saja memiliki dinamika yang menarik untuk dikaji. Berbagai tulisan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dipaparkan sebelumnya, belum ada yang membahas tentang bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada rentang tahun 1999 hingga 2004 ditinjau dari perspektif makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran. Tulisan ini berupaya menggali kondisi Indonesia pada



rentang waktu tersebut dan strategi pemerintah dalam mengatasinya. Periode pemerintahan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarno Putri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu berdasarkan suatu data yang diperoleh. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian sejarah ini adalah 1) Heuristik, 2) Kritik Sumber, 3) Interpretasi, 4) Historiografi. Pada proses heuristik, peneliti menelusuri sumber primer yaitu data terkait ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder yaitu buku dan artikel terkait krisis dan kondisi ekonomi Indonesia tahun 1999-2004. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi untuk menemukan data yang valid. Tahapan selanjutnya, data tersebut kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam historiografi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Awal Reformasi Tahun 1999 – 2004**

Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut dalam masa pemulihan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pasca krisis 1998, Indonesia terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mempunyai sebuah landasan ekonomi yang kokoh. Harapannya adalah

memperbaiki standar kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan dapat memperluas lapangan pekerjaan (Tarigan, 2007).

### **1. Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 1999-2004**

Inflasi merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang penting untuk dikendalikan, pentingnya hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwasannya inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif atas kesejahteraan masyarakat. Fenomena inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi di masa krisis berada pada angka -13,6% dan laju inflasi pada tahun 1998 berada di angka 77,6% (Arifin, 2004; Badan Pusat Statistik, 1999). Inflasi yang tinggi sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia karena sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi makro.

Inflasi tidak terjadi begitu saja melainkan dipicu oleh beberapa faktor sebagai sumber penyebabnya, inflasi juga salah satu indikator ekonomi penting bagi suatu negara khususnya pada negara berkembang untuk dapat melihat stabilitas perekonomian. Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga barang-barang impor, kekacauan ekonomi dan politik, jumlah uang yang beredar, defisit anggaran belanja pemerintah (Nugroho, 2016).

Perkembangan inflasi yang meningkat di suatu negara akan memberikan hambatan pertumbuhan terhadap ekonomi untuk menjadi lebih baik, kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi inflasi yang cukup tinggi untuk menjadikan perekonomian lebih baik dan krisis ekonomi tidak terjadi lagi akibat tingginya inflasi. Laju pertumbuhan inflasi Indonesia tahun 1999 hingga 2004 tercatat mengalami dinamika yang naik turun. Setelah mengalami kenaikan

drastis di tahun 1998, pada tahun 1999 terjadi penurunan hingga 2,97% di bulan Januari. Namun, di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2004 laju inflasi Indonesia terus mengalami kenaikan. Tingkat inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 12,55% (tabel 1).

**Tabel 1**  
**Laju Inflasi Indonesia tahun 1999-2004**  
**Dalam Persen (%)**

<b>Bulan</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Januari	2,97	1,32	0,33	1,99	0,80	0,37
Februari	1,26	0,07	0,87	1,50	0,20	-0,02
Maret	-0,18	-0,45	0,89	-0,02	-0,23	0,36
April	-0,68	0,56	0,46	-0,24	0,15	0,97
Mei	-0,28	0,84	1,13	0,80	0,21	0,88
Juni	-0,34	0,50	1,67	0,36	0,09	0,48
Juli	-1,05	1,28	2,12	0,82	0,03	0,39
Agustus	-0,93	0,51	-0,21	0,29	0,84	0,09
September	-0,68	-0,06	0,64	0,53	0,36	0,02
Oktober	0,06	1,16	0,68	0,54	0,55	0,56
November	0,25	1,32	1,17	1,85	1,01	0,89
Desember	1,73	1,94	1,62	1,20	0,94	1,04
<b>Tahunan</b>	<b>2,01</b>	<b>9,35</b>	<b>12,55</b>	<b>10,03</b>	<b>5,06</b>	<b>6,40</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 1999)

Inflasi yang terjadi pada akhir tahun 2001 menunjukkan dari sejumlah 43 kota ternyata terdapat 41 kota yang inflasi, sedangkan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon hingga 5,60 persen, sedangkan inflasi terendah di Kota Banjarmasin sebesar 0,02 persen. Deflasi terjadi di Kota Manado yaitu sebesar minus 0,16 persen, sedangkan di Kota Denpasar deflasi berada pada angka minus 0,21 persen. Inflasi yang tinggi di tahun 2001 disebabkan oleh kenaikan harga pada barang dan jasa meliputi bahan makanan sebesar 2,92 persen. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,34 persen, perumahan yaitu 1,22 persen, sandang 1,12 persen, bidang kesehatan



0,28 persen, pendidikan rekreasi dan olahraga 0,25 persen, serta bidang transportasi dan komunikasi sebesar 0,60 persen (Badan Pusat Statistik, 2002).

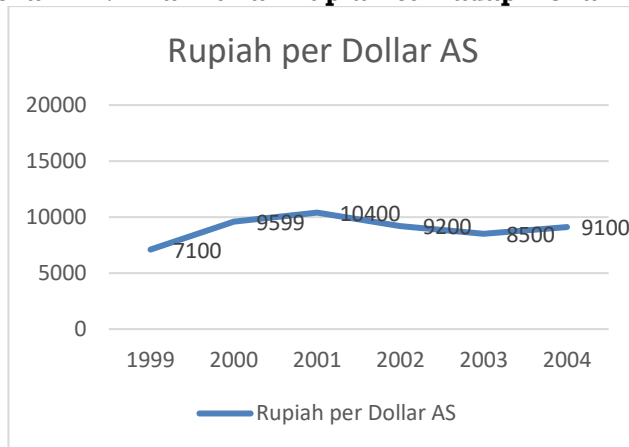
## **2. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pada periode 1999 hingga 2004, laju pertumbuhan perekonomian Indonesia mulai memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 1999 hingga 2004, tercatat mengalami kenaikan. Dari sebesar 0,8 persen pada tahun 1999 menjadi 5,13 persen pada tahun 2004 (Arifin, 2004). Hal tersebut merupakan dampak positif dari kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah dalam menangani pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis. Pemerintah berupaya memberikan kebijakan dengan melakukan likuidasi terhadap bidang perbankan hingga dapat menarik kembali para investor asing memulai kegiatan ekonominya di Indonesia. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada dekade 1980 hingga pertengahan tahun 1990an, proses pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lambat disebabkan ketidakstabilan politik, penyelesaian konflik sosial dan kepastian hukum.

Hal tersebut merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam penentuan keputusan bagi negara-negara pelaku bisnis untuk melakukan usaha di negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengeluaran konsumsi juga mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 juga mencapai 3%, kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang terjadi meningkatkan dalam pembentukan PDB dapat mengindikasikan bahwa semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi (Hakim & Giovani, 2012).

Pada aspek nilai tukar rupiah, di tahun 1999 nilai tukar rupiah atas dollar melemah pada awal bulan Mei hingga Juni dari Rp8.000,00 menjadi lebih dari Rp16.000,00, selain itu tingkat inflasi juga hampir mendekati angka 100%. Namun pada akhir tahun 1999, nilai tukar rupiah kembali menguat menjadi Rp 7100 per Dollar AS. Sayangnya, di tahun-tahun berikutnya rupiah melemah hingga Rp 9100 per Dollar di tahun 2004 (grafik 1).

**Grafik 1. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dampak melemahnya nilai tukar rupiah dirasakan langsung oleh masyarakat dengan naiknya harga seluruh barang, yang disusul dengan semakin langkanya barang-barang. Biasanya, krisis ekonomi yang disertai dengan adanya suatu resesi bahkan dengan depresi sekaligus disertai dengan adanya penurunan dari harga barang-barang. Namun berbeda dengan Indonesia pada saat itu, nilai rupiah yang terperosok menjadikan semua barang melonjak tajam (Gie, 1999). Oleh karena itu, situasi Indonesia pada saat itu merupakan suatu anomali.





Di sisi lain, daya beli masyarakat ikut merosot tajam, sehingga tidak mampu menyerap hasil produksi. Alhasil, pada awal reformasi pabrik-pabrik tersebut gulung tikar. Beberapa yang tetap bertahan, memilih untuk efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya jumlah pengangguran bertambah demikian pula dengan penduduk miskin. Dampak dari kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar berdampak pula pada dunia sektor industri. Industri yang sebagian besar bergantung pada bahan baku dan bahan impor, harus merogoh kocek dua kali lipat untuk membeli bahan baku.

### **3. Dampak Krisis Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam menilai suatu kinerja perekonomian, terutama dalam pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau wilayah, ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, laju pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan berdampak pada ketimpangan yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia, pengangguran merupakan suatu masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satu faktor penyebabnya adalah populasi penduduk Indonesia yang tinggi sehingga memunculkan

angkatan kerja yang baru setiap tahunnya dan sangat berdampak pada tingkat pengangguran (Prastiwi & Handayani, 2019).

Tingkat pengangguran merupakan salah satu ukuran efisiensi dalam perekonomian, ketika pengangguran terjadi, beberapa input tenaga kerja yang tersedia tidak digunakan, yang berarti hilangnya produksi. Penurunan produksi barang dan melakukan pemutusan hubungan kerja, Akibatnya pengangguran di dalam negeri semakin meningkat setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2004 angka pengangguran mencapai angka 10 juta orang.

**Tabel 3**  
**Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran 1999-2004**

Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran
1999	94.847.178	6.030.319
2000	95.650.961	5.813.231
2001	98.812.448	8.005.031
2002	100.779.270	9.132.104
2003	102.750.092	9.939.301
2004	103.973.387	10.251.351

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingginya jumlah pengangguran berpengaruh pada tidak terkontrolnya kehidupan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Bertambahnya pengangguran menyebabkan maka angka kemiskinan terus bertambah dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Terjadi krisis ekonomi di Indonesia mengakibatkan banyaknya kekacauan yang terjadi di berbagai daerah, pertumbuhan ekonomi menurun, inflasi meningkat, angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat dan lain-lain.

Krisis ekonomi melanda wilayah desa mengakibatkan sebagian dari warganya bermigrasi ke kota-kota besar, ketidaksiapan kota untuk menampung serta menurunkan *primary social control* membuat para



pendatang melakukan berbagai aksi dengan cara tidak sah untuk tetap mempertahankan hidupnya. Pada tahun 2000 di sembilan wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Depok dan KPPP Tanjung Priok) total kejahatannya berjumlah 16.346 kasus dan tahun sebelumnya mencapai 18.603 kasus (Ahyar, 2001).

Tingkat kriminalitas Indonesia setiap tahunnya mengalami pasang surut dimana pada tahun 2000 angka kriminal mencapai 172.532 Kasus, tahun 2001 mencapai 187.226 kasus, tahun 2002 184.359 kasus, tahun 2003 mencapai 196.931 kasus dan tahun 2004 mencapai 220.886 kasus, faktor kemiskinan dan pengangguran mengakibatkan tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

### **Strategi Pemerintah Mengatasi Permasalahan Ekonomi**

Kondisi ekonomi yang fluktuatif memunculkan rasa tidak percaya rakyat terhadap pemerintah. Berbagai aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa organisasi massa menuntut kesigapan pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi krisis ini. Berikut ini adalah strategi kebijakan yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2004 yaitu masa pemerintahan Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarno Putri.

#### **1. Kebijakan Moneter**

Dalam penanganan masalah inflasi, pemerintah menggunakan instrumen moneter untuk meredam tingkat inflasi. Kebijakan Moneter merupakan sebuah usaha untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan dengan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar, hal tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi (Kartini, 2019). Pemerintah Indonesia pada saat itu



mengeluarkan beberapa kebijakan moneter diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pada kuartal pertama tahun 1998 suku bunga SBI berada di angka 22%, namun setiap bulan SBI mengalami kenaikan suku bunga hingga pada kuartal ketiga suku bunga SBI mencapai angka 70,44%. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meredam laju inflasi yang disebabkan karena tingginya jumlah uang beredar di masyarakat dan gejolak nilai tukar rupiah.

Strategi lainnya adalah melakukan independensi kebijakan moneter dimana presiden mengesahkan Undang-Undang mengenai perbankan agar bank memaksimalkan keberadaan serta tugasnya yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Undang-undang ini menyatakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan sebuah bank yang independen dan terbebas dari adanya campur tangan pemerintah maupun pihak pihak lain. Status independen tersebut membuat BI memiliki tugas diantaranya untuk mencapai dan memelihara kestabilan atas nilai tukar rupiah dan mencapai sasaran laju inflasi, program reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah ini memberikan dampak yang baik bagi Indonesia terutama untuk meningkatkan jumlah investor asing dan meningkatkan kurs rupiah terhadap dolar US yang sebelumnya menurun drastis (Afiyah, 2021).

Penanganan inflasi yang dilakukan pemerintah difokuskan dalam mencapai suatu kondisi fiskal yang sehat serta dapat mengurangi adanya laju inflasi, menjaga persediaan cadangan devisa untuk kebutuhan jangka menengah. Untuk mencapai target tersebut cakupannya sebagai berikut : 1) mengurangi rasio utang terhadap PDB, 2) melakukan reformasi dan modernisasi pada sistem perpajakan nasional, 3) mengurangi defisit anggaran bertahap untuk mendapatkan posisi yang seimbang, 4)



mengembangkan sistem pengelolaan utang yang efektif, 5) meningkatkan efisiensi belanja pemerintah (Aswicahyono & Christian, 2017).

Strategi ini cukup efektif karena mampu menekan tingkat inflasi dari 77 persen tahun 1998 menjadi 2,01 persen di tahun 1999. Meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2001 dan 2002, namun inflasi cukup stabil di tahun 2003 dan 2004 di angka sekitar 6 persen (tabel 1).

## **2. Likuidasi Perbankan**

Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan likuidasi perbankan. Pada awal pemerintahan reformasi menghadapi kondisi perbankan yang lemah dimana Sektor perbankan tidak berfungsi sebagai intermediasi aliran dana karena banyak ditemukan bank-bank yang bermasalah. Pemerintah melakukan likuidasi terhadap 38 bank, mengambil alih 7 bank dan melakukan rekapitalisasi 9 bank. Program tersebut diawasi langsung oleh Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hal tersebut dilakukan agar semua proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak terjadi sebuah penyalahgunaan tabungan dari nasabah dan juga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank yang beroperasi (Wijaya et al., 2020).

Program likuidasi ini berdampak pada peningkatan investor asing yang mulai kembali melakukan kegiatan ekonominya dan juga melakukan beberapa pengambilalihan saham-saham bank. Selain dapat meningkatkan investor asing program likuidasi ini juga berdampak pada penguatan nilai rupiah serta dapat mengendalikan tingkat inflasi.

## **3. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional**

Kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan membentuk sebuah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang memiliki tugas: Pertama, mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagai masukan serta nasehat



kepada Presiden untuk melakukan tindakan lanjutnya. Kedua, menanggapi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat sebagai bahan laporan kepada Presiden. Ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden terutama berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan Keppres No. 144 tahun 1999. (Nurhuda & Agesti, 2021)

Dewan Ekonomi Nasional menginisiasi berbagai program ekonomi nasional yaitu privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan utang luar negeri, rekonstruksi keuangan, dan usaha kecil menengah (UKM). ini mulai memperbaiki hubungannya dengan *International Monetary Fund* (IMF). Pada tanggal 27 Agustus 2001 indonesia menandatangani *Letter of intent* (LoI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) dengan bantuan dana sebanyak US\$ 400 juta. Tim IMF membawa enam agenda prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia diantaranya: a) mengontrol uang yang beredar; b) melakukan semua revisi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001; c) mengumumkan perolehan pendapatan Badan penyehatan perbankan nasional (BPPN) dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d) mengumumkan hasil kaji ulang komite ombudsman; e) melakukan penyehatan atas bank internasional indonesia; dan f) meneruskan penjaminan bank dengan mengisi rekening 502 .

Pada awal-awal masa pemerintahan Presiden Megawati banyak melakukan privatisasi karena sudah melakukan persetujuan dengan *International Monetary Fund* (IMF), diantaranya PT Indosat, PT Batu Bara Tambang Asam, PT Kimia Farma, dan lain-lain. Privatisasi PT Indosat paling disoroti masyarakat salah satu alasannya adalah dengan pelepasan saham indosat sebesar 41,94% hanya menghasilkan dana sebesar Rp. 5,6 triliun saja. Pemerintah dalam penjualan Badan Usaha Milik Negara



(BUMN) ini beralasan untuk menutupi kerugian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

#### **4. Paket Ekonomi Restrukturisasi Keuangan**

Selama tahun 2003 perekonomian Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan salah satunya adalah dampak dari terjadinya bom bali pada tahun 2002, rencana untuk keluar dari program *International Monetary Fund* (IMF) pada akhir tahun 2003 Indonesia melakukan pemutusan kerjasamanya dengan *International Monetary Fund* (IMF), kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Pemerintah dengan Bank Indonesia telah mengambil beberapa rangkaian kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia dan tetap menjaga kestabilan ekonomi makro yang sudah berjalan, berkat berbagai langkah kebijakan yang sudah dilaksanakan kondisi ekonomi Indonesia cenderung membaik dan mulai stabil (Hakim & Giovani, 2012).

Pada tahun 2004 merupakan sebuah fase baru dalam pengelolaan ekonomi dimana Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara yang mengalami krisis di Asia yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan *International Monetary Fund* (IMF), Indonesia menyelesaikan programnya dengan *International Monetary Fund* (IMF) ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro Indonesia sudah semakin membaik, serta rasa kepemilikan lebih tinggi karena sudah tidak didikte oleh *International Monetary Fund* (IMF) serta kuatnya komitmen untuk melanjutkan reformasi ekonomi secara mandiri.

Berakhirnya program bantuan *International Monetary Fund* (IMF) tersebut Indonesia menyetujui sebuah pemantauan pasca program (Post Program Dialogue) yang akan dilakukan oleh tim *International Monetary Fund* (IMF) dengan waktu kunjungan sebanyak 2 kali dalam setahun hal tersebut dilakukan untuk memantau jalannya reformasi ekonomi yang



sudah dirancang oleh pemerintah dalam paket kebijakan White Paper. Pemantauan pasca program ini tidak hanya dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) saja tapi pernah dilakukan oleh Kadin Indonesia yang membentuk tim pemantauan independen yang memiliki kerja sama dengan beberapa kamar dagang asing (Aswicahyono & Christian, 2017).

Pasca pemutusan kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan paket ekonomi setelah berakhirnya kerjasamanya dengan *International Monetary Fund* (IMF) yaitu Restrukturisasi Keuangan. Kebijakan dalam aspek ini difokuskan pada: a) Restrukturisasi pada sektor modal, asuransi dan dan pensiun; b) mendirikan jaring pengaman pada sistem keuangan (*financial safety net*) dengan cara melakukan pendirian lembaga penjamin simpanan LPS); c) memperkuat struktur governance bank negara dan melakukan perbaikan kesehatan sektor perbankan.

## **5. Peningkatan Investasi**

Pemerintah menyadari akan pentingnya sektor swasta dalam aspek ini dan tugas dari pemerintah juga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas sektor swasta dengan melalui kebijakan dan lembaga pemerintahan yang berfungsi, diantaranya : 1) meninjau daftar negatif dari investasi, 2) pemberantasan korupsi, 3) menyederhanakan perizinan lewat layanan satu atap, 4) restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi (Simorangkir & Hutabarat, 2017).

Iklim investasi indonesia pada awal reformasi masih sangatlah buruk dimana laju investasi hanya sekitar 20% dari PDB, masih sangat jauh dari presentasi sebelum krisis melanda bisa mencapai 30%. Pada tahun 2003 ditetapkan sebagai tahun investasi masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti, sementara di bidang ekspor pun belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah dalam hal ini mempunyai agenda





yang sangat luas dimana pemerintah harus dapat menciptakan kepercayaan investor baik investor asing maupun domestik untuk menanam saham di Indonesia (Baasir, 2004).



## **6. Program Menekan Angka Pengangguran**

Untuk menekan angka Pengangguran, pemerintah memberikan program mengenai penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan dilaksanakan melalui program padat karya khusus kota dan desa. Program Padat Karya meliputi program pembangunan kecamatan (PPK) dan memberikan pelatihan kembali bagi tenaga terampil yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program ini dimaksudkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan masyarakat serta dapat memberikan pekerjaan dan pendapatan kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini menyediakan bantuan langsung pada masyarakat (BLM) sebesar Rp 500 juta – Rp1 miliar per kecamatan tergantung jumlah penduduk disetiap kecamatan (Multifiah, 2011).

Upaya lain untuk mengatasi pengangguran adalah mendorong mobilitas tenaga kerja lintas kegiatan ekonomi melalui pelatihan yang sistematis dan terarah. Pemerintah juga membantu memberikan wawasan pengetahuan mengenai jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berbagai program pemulihan ekonomi pada tahun 1999 hingga 2004, mampu menaikkan laju pertumbuhan ekonomi meskipun tidak signifikan.

**Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1999 - 2004**

Indikator	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,8	4,8	3,3	3,6	4,0	5,13
Laju Inflasi Kumulatif (%)	2,01	9,35	12,55	10,03	5,06	6,40
Suku Bunga Tahunan (%)	22,9	16,16	17,4	15,8	10,55	7,17

Sumber: (Arifin, 2004)

## KESIMPULAN

Hantaman krisis moneter pada tahun 1997 berdampak besar pada kehidupan ekonomi Indonesia. Tahun 1998 menjadi titik terendah kondisi perekonomian Indonesia. Krisis moneter bertransformasi menjadi krisis ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi (mencapai 77 persen di tahun 1998), laju pertumbuhan ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah yang sangat tinggi terhadap Dollar Amerika, serta tingginya angka pengangguran sehingga berakibat rendahnya daya beli. Periode tahun 1999 hingga 2004 menjadi tahun-tahun kritis yang menentukan nasib Indonesia, apakah bangkrut atau tetap eksis. Strategi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi meliputi kebijakan moneter, melakukan likuidasi perbankan, pembentukan dewan ekonomi nasional, paket ekonomi restrukturasi keuangan, peningkatan investasi, dan penyelesaian masalah pengangguran. Berbagai strategi ini membuahkan hasil yaitu secara perlahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2), 249–262. <https://doi.org/10.17977/um021v15i22021p249>
- Ahyar. (2001). *Analisis data statistik kriminal polisi terhadap dimensi*



- kejahatan di perkotaan. PPITK. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Arifin, B. (2004). *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*. Ghalia Indonesia. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17810>
- Armiyati, L. (2014). Industri Perak Kotagede Yogyakarta Melawan Badai Krisis. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(1), 1–11.
- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*.
- Baasir, F. (2004). *Indonesia Pasca Krisis: Catatan Politik Dan Ekonomi 2003-2004*. Surya Multi Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (1999). *Statistik Indonesia 1999*. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ODc2YmU4ZGRjN2U0ZDUzMWfhZDRkYmUy&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMDAvMDUvMTUvODc2YmU4ZGRjN2U0ZDUzMWfhZDRkYmUyL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMTk5OS5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMy0wNC0wMSAwNTozNT01Ng%3D%3D>
- Badan Pusat Statistik. (2002). *Berita Resmi Statistik*.
- Gie, K. K. (1999). *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, A., & Giovani, G. (2012). Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/JIBE.V3I2.2238>
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135–148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>
- Kartini, S. (2019). *Mengenal Inflasi*. Mutiara Aksara.
- Multifiah. (2011). Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Tinjauan Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.21776/UB.JIAE.005.01.1>
- Nugroho, T. G. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8296/jurnal.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Nurhuda, A., & Agesti, Y. Z. (2021). Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001). *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(1), 113–123. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2949>
- Prastiwi, D., & Handayani, H. R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah



Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje/article/view/4058>

Simorangkir, I., & Hutabarat, L. E. (2017). *Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945-2017*. Katadata.

Tarigan, R. (2007). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Era Reformasi* (1998).  
<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/747/08/E00148.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Wijaya, A. M., Marjono, & Sugiyanto. (2020). The Role of President B.J. Habibie In Overcoming Economic Crisis In Indonesia In The 1998-1999. *Historica*, 1(3), 284–295.